

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang ada secara nasional, antara lain: a) Kebakaran hutan dan lahan b) Kerusakan hutan akibat hutan open access yang tidak terkelola; c) terjadinya lahan kritis; d) besarnya beban pencemar; e) pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin maraknya konflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain: a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil ; b) kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung lingkungan hidup melalui kerjasama antar wilayah administrasi belum kuat; c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya ke dalam biaya produksi; d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti : rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek; e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:

- a) Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.
 - b) Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi secara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA. Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder. Perbaiki kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan antar sektor dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership LH yang antara lain mengembangkan jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).
-

- c)Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA) SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumberdaya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. untuk melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.
- d)Perlindungan dan pemulihan daya dukung. Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif LH.
- e)Pengendalian beban lingkungan hidup Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.
- f)Kebijakan Penegakan hukum. Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hukum lingkungan Kapasitas yustisia dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan mengkaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan
-

perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di setiap wilayah ekoregion.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD)

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 – 2021, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2017 – 2021 adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dibidang lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menjawab tantangan serta isu global tentang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis :

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran – sasaran strategis yaitu :

- 1) Terkelolanya Sumber Daya Alam dan fungsi Lingkungan Hidup Secara Baik.
 - 2) Terpeliharanya Kualitas Sumber Daya Air , Tanah dan Udara.
 - 3) Terwujudnya penataan hukum di bidang Lingkungan baik terhadap masyarakat maupun
-

dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

4)Terlindungnya Kelestarian Keragaman Hayati.

5)Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan yang sehat.

3.3 Program dan Kegiatan Untuk Tahun 2018

Untuk Program dan Kegiatan untuk Rencana Kerja Tahun 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Pelayanan administrasi Perkantoran								
	a. Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya belanja perangko, materai, benda pos, dan pengiriman surat	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	4.000.000	APBD Kab			
	b. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya telepon, air, dan aliran listrik	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	70.000.000	APBD Kab			
	c. Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya honorarium panitia pelaksana kegiatan administrasi keuangan	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	110.000.000	APBD Kab			
	d. penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat – alat kebersihan kantor	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	9.000.000	APBD Kab			
	e. penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	75.000.000	APBD Kab			
	f. penyediaan Kompenen Listrik dan penerangan bangunan Kantor	Tersedianya kompenen Listrik dan penerangan bangunan Kantor	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	6.000.000	APBD Kab			
	g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	6.500.000	APBD Kab			
	h. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terpenuhinya Jaminan petugas kebersihan	Kab.Tanjab Barat / Luar Daerah	12 bulan	182.000.000	APBD Kab			

			i. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan Luar daerah	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	290.000.000	APBD Kab			
			II. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur								
			a. Pembangunan Gedung Laboratorium	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan gedung Laboratorium	LH Kab.Tanjab Barat	1 Unit	7 5.000.000	APDB Kab			
			b. Pembangunan Sekretariat Program kampung iklim (Proklim)	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan gedung Laboratorium	LH Kab.Tanjab Barat	1 Unit	270.000.000	APDB Kab			
			c. Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya belanja, computer, ac, laptop, CCTV, penghancur kertas dan belanja lainnya.	LH Kab.Tanjab Barat	12 bulan	90.000.000	APBD Kab			
			d. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Terlaksananya belanja Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	LH Kab.Tanjab Barat	6 Unit	120.000.000	APBD Kab			
			e. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	LH Kab.Tanjab Barat	1 gedung 1 Penjaga	16.000.000	APBD Kab			
			f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Oprasional	Terpeliharanya kendaraan dinas Oprasional	LH Kab.Tanjab Barat	36 unit kendaraan	1.400.000.000	APBD Kab			
			g. Pemeliharaan rutin peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan mesin tik, computer, ac, laptop, dan TV	LH Kab.Tanjab Barat	45 unit peralatan	20.000.000	APBD Kab			
			H. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kebersihan	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Kebersihan	LH Kab.Tanjab Barat	74 unit peralatan	25.000.000	APBD Kab			
			III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
			a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian dinas sebanyak 71 stel	LH Kab.Tanjab Barat	71 stel	35.00.000	APBD Kab			

			b. Pengadaan pakaian Kerja lapangan	Terlaksananya Pengadaan pakaian Kerja lapangan	LH Kab. Tanjab Barat	160 set	100.000.000	APBD Kab			
			IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			a. Penyusunan laporan - laporan	Tersusunnya laporan akhir tahun	LH Kab. Tanjab Barat	16 laporan	49.000.000	APBD Kab.			
			V. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.								
			a. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelola persampahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pada masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Tanjab Barat	2 kali Sosialisasi	7000.000	APBD Kab			
			b. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Terlaksananya pembangunan Gedung pengelolaan sampah/ bank sampah/ penyedia peralatan pengolah sampah	Kab. Tanjab Barat	100%	240.000.000	APBD Kab			
			c. Peningkatan fungsi sungai dan drainase	Terpeliharanya kebersihan sungai dan drainase	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	176.850.000	APBD Kab			
			d. Oprasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pengawasan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir	Kab. Tanjab Barat	1 Lokasi	163.700.000	APBD Kab			
			e. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Kab. Tanjab Barat	12 bulan	1.905.160.000	APBD Kab			
			f. Pembuatan Biogas	Terlaksannya pembuatan biogas dari kotoran ternak atau samapah	Kab. Tanjab Barat	100%	75.000.000	APBD Kab			
			VI. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup								

			a. Penataan hukum lingkungan	Pengawasan dan pembinaan dunia usaha pada peraturan perundangan – undangan lingkungan	Kab.Tanjab Barat	55 dunia usaha	110.000.000	APBD Kab			
			b.Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 - Pembinaan usaha skala kecil penghasil limbah B3	Kab. Tanjab Barat	100	115.000.000	APBD Kab	-		
			c. pengkajian Dampak Lingkungan	-Kegiatan implementasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) -Penyusunan dokumen neraca sumber daya alam	Kab.Tanjab Barat	Laporan RKL-RPL 50 perusahaan, Dokumen SLHD, Dokumen Neraca lingkungan hidup	68.250.000	APBD kab	-		
			d. Kordinasi Penilaian kota sehat /adipura	Terlaksananya kordinasi persiapan pemantauan adipura, sosialisasi proklam dan sosialisasi kalpataru	Kab. Tanjab Barat	32 titik pantau adipura, pembinaan proklam dan 1 kali sosialisasi	145.000.000	APBD kab			
			e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kualitas SDA dan lingkungan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi adipura kegiatan lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM)	Kab. Tanjab Barat	3 Kegiatan	145.000.000	APBD kab			
			f. Peningkatan kapasitas SDM Pengendalian Lingkungan Hidup.	Terlaksana sosialisasi pengawasan pengendalian lingkungan hidup (Limbah b3. Proper dan sipil, IPAL, LA, Penanganan kasus lingkungan dan implementasi peraturan perundang -undangan	Kab. Tanjab Barat	3 Kali Sosialisasi	65.000.000	APBD kab			
			VII.Program Perlindungan Dan Konsevasi sumber daya Alam								
			a. Pemantauan Kualitas Badan air Sungai	Pengujian limbah cair perusahaan dan kualitas air sungai	Kab.Tanjab Barat	18 perusahaan, 10 sungai, 2 pesisir	149.872.952	APBD kab			
			b. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri	terlaksananya pengujian emisi/polusi pada perusahaan	Kab.Tanjab Barat	14 perusahaan	85.008.008	APBD kab			
			c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kulaitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	terlaksananya kegiatan sosialisasi adiwiyata, kegiatan lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM)	Kab.Tanjab Barat	3 Kegiatan	136.800.000	APBD kab			

			VIII. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi dan Sumber Daya Alam Lingkungan							
			a. Penyusunan SLHD dan Neraca SDA	Penyusunan SLHD dan Neraca SDA	Kab. Tanjab Barat	1 dokumen	87.750.000	APBD Kab.		
			b. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup	Meningkatnya pengetahuan dan akses masyarakat memberikan informasi terkait kerusakan lingkungan	Kab. Tanjab Barat	3 kegiatan	119.460.000	APBD kab		
			c. Peringatan HLH Sedunia dan Pekan Pameran Lingkungan Hidup	Tumbuhnya motivasi masyarakat tentang Pengelolaan lingkungan	Kab. Tanjab Barat	2 Kegiatan	219.100.000	APBD Kab		
							6.735.069.421			

Kuala Tungkal, Juli 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SUPARJO. SE
NIP.19680116 199703 1 002

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017- 2021.

Rencana Kerja tahunan ini memuat program – program dan kegiatan – kegiatan untuk mencapai sasaran strategis , dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 inidiharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan – tantangan dan permasalahan lingkungan hidup kedepanya terutama di tahun 2020 mendatang.

KATA PENPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 yang memuat tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada Rencana Setrategis SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017- 2021. Sehubungan dengan itu. Maka di susunlah suatu Rancangan Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018.

Demikianlah Rancangan Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dibuat. Namun kami masih menyadari bahwa dalam penyusunan rancangan rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Kuala Tungkal, Juli 2017

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO. SE

Pembina

NIP. 19680116 199703 1 002

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian kinerja	5
Tabel 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD.....	9
Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	11
Tabel 2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	15
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan tahun 2018.....	19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian kinerja	5
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD	9
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	10
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	11
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
3.3. Program dan Kegiatan tahun 2019.....	19
BAB IV PENUTUP.....	24
